

**Balai Besar Pelatihan
Kesehatan (BBPK)
Makassar**



**Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas karunia dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Satker yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan BBPK Makassar Tahun 2018 ini memuat visi, misi, struktur organisasi untuk mencapai tujuan program kegiatan Tahun 2018.

Dengan disusunnya RKT Tahun 2018 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi BBPK Makassar guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan.

Makassar, Maret 2018
Kepala,

Laode Musafin



BAB I

PENDAHULUAN

▪ **Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan pada tahun 2015 – 2019 telah diamanahkan di dalam Kepmenkes Nomor: HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Renstra Kemenkes RI tahun 2015. Terdapat 12 sasaran strategis yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan antara lain meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan dengan indikator jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya. Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar menunjang pencapaian indikator tersebut di atas dengan menyelenggarakan pelatihan kesehatan yang terakreditasi bagi SDM Kesehatan Pusat dan Daerah.

Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar sebagai unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) Kesehatan, dalam merencanakan setiap kegiatan pengembangan program pelatihan wajib mengacu terhadap Kepmenkes tersebut.

Dalam rangka mencapai sasaran serta indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka BBPK Makassar perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018.

▪ **Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan BBPK Makassar Tahun 2018 mempunyai maksud sebagai perencanaan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh BBPK Makassar Tahun 2018. Dengan tujuan sebagai pedoman seluruh pihak dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan BBPK Makassar Tahun 2018

▪ **Visi dan Misi**

Visi dan Misi BBPK Makassar mengacu pada Visi dan Misi Presiden RI,

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sejalan dengan visi BBPK Makassar, maka diperlukan rumusan mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang akan dicapai. Adapun upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

▪ **Motto**

BBPK Makassar mempunyai motto, yaitu

A' Bulo Sibatang (Bersatu Meraih Tujuan)

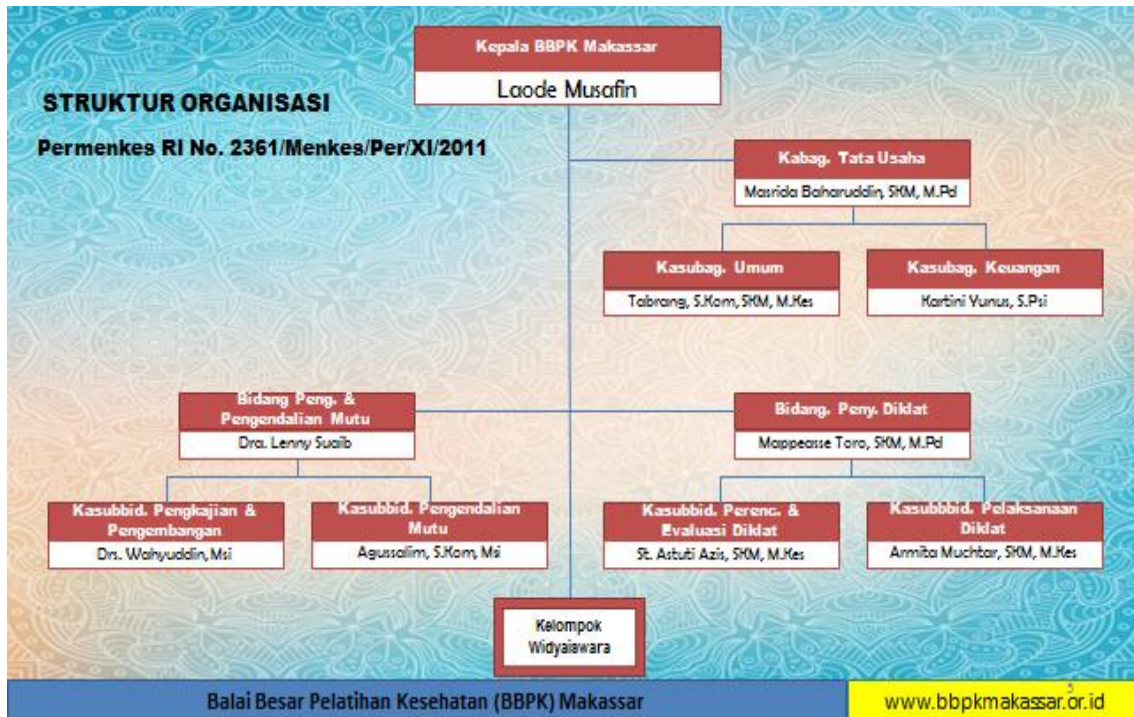
▪ **Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

BBPK Makassar mempunyai tugas yaitu melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BBPK Makassar mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- b. Pelaksanakan kerjasama nasional maupun internasional di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- c. Pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- d. Pengembangan metode dan teknologi pelatihan, pemantauan, evaluasi sistem informasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- e. Penyiapan pengembangan kemitraan;
- f. Pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Struktur organisasi BBPK Makassar dapat dilihat pada diagram berikut :



BAB II

SASARAN/ PROGRAM STRATEGIS

Pada tahun 2018, BBPK Makassar menetapkan sasaran/ program strategis dalam mencapai visi, misi, dan tujuan BBPK Makassar Tahun 2018, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya mutu aparatur melalui pelaksanaan pelatihan teknis, jabatan, fungsional, penjenjangan, dan prajabatan (Latsar) bagi Aparatur Kesehatan
2. Meningkatnya mutu tenaga kesehatan melalui pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan
3. Meningkatnya mutu diklat melalui pelaksanaan pengembangan diklat kesehatan
4. Meningkatnya mutu diklat melalui pelaksanaan pengendalian mutu kesehatan
5. Meningkatnya mutu diklat melalui pelayanan informasi dan teknologi kesehatan
6. Meningkatnya mutu diklat melalui pengembangan sumber daya kesehatan
7. Meningkatnya Dukungan Manajemen Diklat dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya melalui Pelaksanaan Manajemen Keuangan dan Perkantoran

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBPK Makassar Tahun 2018, diperlukan perencanaan yang dijabarkan melalui Rencana Kinerja Tahunan BBPK Makassar Tahun 2018 sebagai berikut :

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018

Pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dengan indikator kinerja Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan terakreditasi sebanyak 2.815 orang.

▪ **Pelatihan Dasar CPNS Gol. III**

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola prakondisi yang ditandai dengan kekayaan alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar dan demokrasi yang relatif stabil. Sejumlah keputusan strategis mulai dari merumuskan kebijakan sampai pada implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan dilaksanakan oleh PNS. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan. Selama ini pelatihan pembentukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (Diklat Prajabatan), dimana praktik penyelenggaraan Pelatihan yang pembelajarannya didominasi oleh ceramah sulit membentuk karakter PNS yang kuat dan profesional.

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4); CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses Diklat terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab,

dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Diperlukan sebuah penyelenggaraan Pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu penyelenggaraan Pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat Pelatihan dan di tempat kerja sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituaasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional. Melalui pembaharuan Pelatihan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan PNS profesional yang berkarakter dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa.

Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan konsep Diklat Prajabatan dilakukan dengan mengembangkan desain Diklat terintegrasi sejalan dengan perkembangan dinamika tuntutan jabatan dan penguatan terhadap kompetensi bidang sesuai dengan formasi jabatan yang ditetapkan. Nomenklatur Diklat Prajabatan diubah menjadi Pelatihan Dasar Calon PNS, sebagai salah satu jenis Pelatihan yang strategis pasca UU ASN dalam rangka pembentukan karakter PNS dan membentuk kemampuan bersikap dan bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif *whole of government* atau *one government* yang didasari nilai-nilai dasar PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat.

Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III diselenggarakan untuk membentuk PNS profesional yang berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap dan perilaku disiplin PNS, nilai-nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

Sasaran penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS bagi CPNS Golongan III adalah terwujudnya PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat.

Untuk dapat membentuk sosok PNS tersebut, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pelatihan Dasar CPNS Golongan III yang mengarah kepada upaya:

1. Menunjukkan sikap perilaku dan disiplin PNS;
2. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
3. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI; dan
4. Menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas.

Pelatihan Dasar CPNS Golongan III tahun 2018 dilakukan pengembangan metode yaitu pendampingan oleh TNI Rindam XIV Hasanuddin untuk membentuk karakter yang disiplin dan penanaman cinta terhadap NKRI melalui kegiatan sehari-hari untuk membudayakan peserta selama pelatihan. Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dilaksanakan mulai minggu ke I April 2018. Selama Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III pada kurikulum pembentukan karakter PNS dilaksanakan selama 113 Hari Kerja atau 1141 Jam Pelatihan (JP), dengan perincian: 33 hari kerja atau setara dengan 303 JP untuk pembelajaran klasikal, dan 80 hari kerja atau setara dengan 853 JP untuk pembelajaran non klasikal atau aktualisasi di tempat kerja. Dengan jumlah peserta 30 orang yang dilaksanakan di BBPK Makassar dengan biaya Rp. 1.057.007.000,-

- Diklat Prajab Gol. II

Tujuan umum untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, di samping pengetahuan dasar tentang system penyelenggaraan pemerintahan Negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan dalam PP nomor 101 tahun 2000, Pelatihan Dasar CPNS Golongan I dan II bertujuan :

- a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai kebutuhan instansi
- b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat
- d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan baik.

Sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab PNS dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka standar kompetensi yang perlu dimiliki PNS Golongan I dan II adalah kemampuan dalam :

- a. Menunjukkan komitmen dan integritas moral serta tanggung jawab profesi sebagai PNS
- b. Mewujudkan disiplin dan etos kerja
- c. Menjelaskan pokok-pokok sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia
- d. Menjelaskan posisi, peran, tugas, fungsi, dan wewenang instansi asal peserta dan organisasi publik pada umumnya
- e. Menjelaskan masalah penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- f. Menjelaskan ketentuan-ketentuan kepegawaian berkaitan dengan hak dan kewajiban PNS
- g. Menjelaskan masalah wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
- h. Menerapkan prinsip-prinsip Budaya Organisasi Pemerintah
- i. Mengaplikasikan teknik manajemen perkantoran modern di unit kerjanya
- j. Menerapkan prinsip-prinsip pelayanan prima sesuai dengan bidang tugasnya
- k. Bekerjasama dalam kelompok melalui komunitas yang saling menghargai

Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Golongan I dan II dilakukan pengembangan metode yaitu pendampingan oleh TNI Rindam XIV Hasanuddin untuk membentuk karakter yang disiplin dan penanaman cinta terhadap NKRI melalui kegiatan sehari-hari untuk membudayakan peserta selama pelatihan. Selama Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II pada kurikulum pembentukan karakter PNS dilaksanakan selama 113 Hari Kerja atau 1141 Jam Pelatihan (JP), dengan perincian: 33 hari kerja atau setara dengan 303 JP untuk pembelajaran klasikal, dan 80 hari kerja atau setara dengan 853 JP untuk pembelajaran non klasikal atau aktualisasi di tempat kerja. Peserta sebanyak 23 orang dilaksanakan pada minggu ke I bulan April 2018. Dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang (2 angkatan) yang dilaksanakan di BBPK Makassar TA 2018 dengan biaya Rp 954.372.000 ,-

- Pelatihan Penugasan Khusus (TUGSUS)

Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan, Daerah Bermasalah Kesehatan, serta Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik.

Penugasan khusus bertujuan untuk mengisi kekurangan/ kekosongan tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah bermasalah kesehatan (DTPK). Penugasan khusus di DTPK ini telah banyak merekrut tenaga kesehatan seperti misalnya pada “team Nusantara sehat” dan program perekrutan lainnya. Akan tetapi hal ini belum sepenuhnya dapat mengisi kekurangan tenaga kesehatan secara nasional. Pola penugasan khusus ini bersifat sementara yaitu saat terjadi kekurangan dan kekosongan tenaga kesehatan di daerah tertentu. Artinya bersifat tidak rutin/ teratur dan dapat dilakukan sewaktu waktu. Kementerian kesehatan dapat mengeksekusi program ini saat pemerintah daerah tidak mampu mengisi kekurangan nakes di daerah masing-masing.

Guna menjamin tenaga kesehatan yang ditugaskan telah memiliki bekal dan kompeten maka BBPK/Bapelkes akan melakukan pelatihan tenaga kesehatan pada penugasan khusus individual pada tahun 2018. Rencana kegiatannya dilaksanakan pada bulan Maret 2018 dengan jumlah peserta sebanyak 1045 orang (35 angkatan) yang dilaksanakan di BBPK Makassar dengan biaya Rp. 10.769.305.000,-

- Pelatihan TKHI (Angk. I, II, III, dan IV)

Dilaksanakan untuk para dokter dan perawat di KTI yang lulus terjaring pada pendaftaran sebagai TKHI di Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sebagai Tim Kesehatan Haji Kloter yang tergabung dalam Embarkasi UPG. Secara umum, tugas TKHI kloter adalah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan terhadap jamaah kelompok

terbangnya serta tugas-tugas administrasi di asrama, embarkasi, selama perjalanan, selama di Arab Saudi, sampai asrama debarkasi. Pelatihan ini rencananya dilaksanakan pada minggu ke I Bulan Maret 2018 sebanyak 105 orang (4 kelas) di BBPK Makassar. Dana yang digunakan bersumber dari DIPA BBPK Makassar TA 2018 sebesar Rp. 765.141.000,-

- TKHI Bapelkes KALTIM

Dilaksanakan untuk para dokter dan perawat di KTI yang lulus terjaring pada pendaftaran sebagai TKHI di Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sebagai Tim Kesehatan Haji Kloter yang tergabung dalam Embarkasi Kalimantan Timur. Pelatihan ini rencananya dilaksanakan pada minggu IV Bulan Mei 2018 sebanyak 54 orang (2 angkatan) di Bapelkes Kalimantan Timur. Dana yang digunakan bersumber dari DIPA BBPK Makassar TA 2018 sebesar Rp. 314.224.000,-

- Pelatihan Jabatan Fungsional (PNBP)

Tujuan umum terselenggaranya pelatihan jabatan fungsional dimana seluruh peserta dipersiapkan untuk lebih profesional menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelayanan sesuai jenjang jabatan yang diatur PerMenpan RI Nomor 01/PER/M.PAN/1/2008 tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya dan memahami tentang hak dan kewajibannya yang telah diatur PERPRES RI Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional. Kegiatan ini dilaksanakan mulai minggu II Bulan Februari sampai dengan November 2018 di BBPK Makassar. Jumlah peserta 240 orang (8 angkatan). Untuk pelaksanaan kegiatan ini biayanya bersumber dari masing-masing peserta, atau Swadana (Non APBN) sejumlah Rp 4.700.000,-

- Pelatihan TOT Strategi Konseling Berimbang

Pada awal tahun 2016, penggunaan BCS atau di Indonesia disebut strategi konseling berimbang (SKB) mulai dikembangkan dan diadaptasi penggunaannya untuk memperkuat layanan konseling KB pasca persalinan (KBPP) pada Program Pilihanku. Adaptasi BCS+KBPP ini dilakukan juga berdasarkan temuan lapangan pada 44 fasilitas program pilihanku- dimana konseling yang umumnya dilakukan sering tidak tercapai kualitas yang diharapkan seperti interaktif, berfokus pada kebutuhan klien, memberikan informasi yang tidak efektif dan jelas seperti efek samping dan kriteria medis yang sesuai berdasarkan WHO medical eligibility criteria. Hal-hal tersebut mempengaruhi kualitas konseling dan adopsi KBPP oleh klien. Disamping hal tersebut kendala lainnya seperti melakukan konseling tanpa alat bantu (ABPK), konseling yang tidak terstruktur, dominasi petugas dan waktu yang dibutuhkan dalam sebuah konseling cukup panjang sering menjadi penyebab rendahnya kualitas konseling KBPP yang diberikan. Data berikut ini akan menunjukkan hubungan antara penggunaan konseling strategi berimbang dengan peningkatan persentase konseling yang dilakukan dan peningkatan adopsi metode KBPP dibandingkan dengan sebelum strategi konseling berimbang dilakukan pada 44 fasilitas dampingan KBPP Pilihanku.

Adapun tujuan diadakannya TOT Strategi Konseling Berimbang ini untuk penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelaksanaan konseling KB pada Puskesmas yang telah mengikuti pelatihan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) pada 31 provinsi.

Kompetensi yang dibangun dalam TOT Strategi Konseling Berimbang adalah kompetensi tenaga kesehatan dalam pelayanan KB kepada masyarakat yang profesional, yang diindikasikan dengan kemampuan :

1. Membantu klien untuk fokus terhadap konseling dan metode pilihannya;
2. Memberikan informasi lebih awal tentang keefektifan dari masing-masing metode;

3. Memandu klien untuk melalui proses konseling dengan menghilangkan metode-metode yang tidak sesuai dengan keinginan klien;
4. Memberikan panduan bagi tenaga kesehatan dan memastikan kualitas informasi yang diberikan.

Peserta Peserta TOT Strategi Konseling Berimbang sebanyak 154 orang (5 angkatan) terdiri dari tenaga fasilitator yang tersebar di 31 provinsi. Rencana kegiatannya dilaksanakan pada bulan Agustus 2018 dengan jumlah yang dilaksanakan di BBPK Makassar selama 7 hari dengan biaya Rp. 1.381.555.000,-

- Pelatihan Enumerator Riskesdas Gigi dan Mulut

Kesehatan gigi merupakan bagian dari kesehatan umum yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Tahun 2015-2019 (KMK No. 9 Tahun 2015) sebagai dasar hukum untuk mencapai target Indonesia Bebas Karies 2030. Guna melakukan evaluasi pencapaian program kesehatan gigi dan mulut serta mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin akan menjadi penghambat Rencana Aksi Nasional yang telah dilaksanakan, maka perlu dilakukan suatu Riset Kesehatan Gigi dan Mulut di tingkat nasional yang terintegrasi dengan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Survei dasar kesehatan gigi-mulut memberikan estimasi tentang status kesehatan gigi dan mulut penduduk sekarang dan kebutuhan masa depan untuk perawatan kesehatan gigi dan mulut. Survei ini menghasilkan data awal yang dapat diandalkan untuk kepentingan pembangunan nasional atau program regional kesehatan gigi-mulut serta perencanaan perawatan gigi-mulut individu dan masyarakat.⁴⁾

Metode survei dasar kesehatan gigi dan mulut mengacu kepada metodologi Riskesdas dengan menggunakan Blok Sensus sebagai dasar pemilihan sampel. Pelaksanaan pengumpulan data pada sampel diintegrasikan ke dalam pemeriksaan biomedis Riskesdas.

Sebelum melakukan pengumpulan data survei, tim pengumpul data mengikuti pelatihan kalibrasi guna memastikan pengumpul data dapat memeriksa secara konsisten, baik untuk keseragaman interpretasi, pemahaman, kriteria dari penyakit dan kondisi yang akan diobservasi serta dicatat. Walaupun para pemeriksa dapat berbeda dalam memberikan penilaian status kesehatan gigi dan mulut individu, mereka harus mendekati satu sama lainnya dalam menilai status suatu kelompok masyarakat. Bilamana suatu survei epidemiologi dilaksanakan oleh suatu team, penting sekali agar para pemeriksa dilatih agar dapat melakukan penilaian secara konsisten. Beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian dari satu pemeriksa dengan pemeriksa lainnya adalah faktor fisik dan psikologis seperti keletihan, perbedaan ketertarikan dalam penelitian, sulit mengambil keputusan serta variasi dalam penglihatan dan perabaan. Faktor tersebut dapat mempengaruhi penilaian dari waktu ke waktu sampai pada tingkat yang berbeda-beda.⁴⁾ Para pengumpul data tersebut (enumerator) akan dilatih dalam suatu pelatihan Enumerator terstandar yang akan diampu oleh pelatih nasional yang akan mengikuti TOT. Pelatihan enumerator adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh PPSDM (Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan) sebagai pelatihan mengkalibrasi keterampilan enumerator dalam melakukan pemeriksaan gigi mulut dalam kegiatan Riskesdas 2018.

Untuk menunjang pelatihan enumerator yang terstandar, diperlukan suatu Kurikulum Pelatihan Enumerator Survei Kesehatan Gigi dan Mulut Terintegrasi riskesdas 2018. Kurikulum ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelatihan secara nasional, acuan bagi para narasumber dalam memberikan materi dan acuan dalam melakukan proses evaluasi kegiatan pelatihan.

Pelatihan ini rencananya dilaksanakan pada minggu ke I Bulan Maret 2018 sebanyak 238 orang (8 angkatan) di BBPK Makassar. Dana yang digunakan bersumber dari DIPA BBPK Makassar TA 2018 sebesar Rp. 1.699.583.000,-

- Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Laporan Kinerja merupakan media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban menjawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Laporan Kinerja merupakan sarana bagi instansi untuk mengkomunikasikan dan menjawab apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

- Penyusunan Laporan Tahunan

Laporan Tahunan merupakan kegiatan untuk memberikan gambaran ringkas tentang pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja di instansi pemerintah termasuk eselon II. Laporan tahunan bersifat analitik, interpretative, dan tindak lanjut.

B. Indikator Kinerja Pendukung Tahun 2018

1. Pelaksanaan Pengendalian Mutu Diklat, dengan indikator kinerja :
 - Jumlah pelatihan yang terakreditasi
 - Jumlah peserta diklat yang mendapat sertifikat
2. Pelaksanaan Pengembangan Diklat Kesehatan, dengan indikator kinerja :
 - Penyusunan Modul
 - Pengembangan Modul
3. Pelayanan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan, dengan indikator kinerja :
 - Jumlah media informasi IPTEK berbasis Website
 - Jumlah media informasi IPTEK berbasis Buletin
4. Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, dengan indikator kinerja :
 - Jumlah SDM dikembangkan kapasitasnya melalui diklat
 - Jumlah sarana dan prasarana penunjang diklat yang dikembangkan
5. Pelaksanaan Manajemen Keuangan dan Layanan Perkantoran, dengan indikator kinerja :
 - Jumlah perencanaan dan pengelolaan anggaran
 - Jumlah laporan manajemen keuangan dan kekayaan negara
 - Jumlah laporan kinerja
 - Jumlah bulan layanan perkantoran

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 ini merupakan komitmen BBPK Makassar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Adapun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BBPK Makassar Tahun 2018 dan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi BBPK Makassar guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan.

**Makassar, Maret 2018
Kepala,**



Laode Musafin

Rencana Kinerja Tahunan

A. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan terakreditasi	2.815 orang

B. Indikator Kinerja Pendukung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Pendukung	Target
1.	Pelaksanaan pengendalian mutu diklat	a. Jumlah pelatihan yang terakreditasi b. Jumlah peserta diklat yang mendapat sertifikat	23 diklat 2.815 orang
2.	Pelaksanaan pengembangan diklat kesehatan	a. Penyusunan Modul b. Pengembangan Modul c. Kegiatan Kemitraan	1 kegiatan - 4 kegiatan
3.	Pelayanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan	a. Jumlah media informasi IPTEK berbasis Website b. Jumlah media informasi IPTEK berbasis Buletin	2 sistem 2 dokumen
4.	Pengembangan sumber daya kesehatan	a. Jumlah SDM dikembangkan kapasitasnya melalui diklat b. Jumlah sarana dan prasarana penunjang diklat yang dikembangkan	80 orang 325 unit
5.	Pelaksanaan Manajemen Keuangan dan Layanan Perkantoran	a. Jumlah perencanaan dan pengelolaan anggaran b. Jumlah laporan manajemen keuangan dan kekayaan negara c. Jumlah laporan kinerja d. Jumlah bulan layanan perkantoran	1 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 12 bulan